

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Kamil, 2012, *Filsafat Kebebasan Hakim*. Kencana, Jakarta.
- Anwar Usman, 2020, *Independensi Kekuasaan Kehakiman: Bentuk-Bentuk dan Relevansinya Bagi Penegak Hukum dan Keadilan di Indonesia*. RajaGrafindo Persada, Depok.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode penelitian ilmu hukum*. Mandar Maju, Bandung.
- Baron De Montesquieu, 2007, *The Spirit of Laws, Dasar-dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik*, M. Khoiril Anam (trans). Nusa Media, Bandung.
- Bryan A. Garner, 2004, *Black's Law Dictionary: Eight Edition*. St. Paul: West.
- Elliot Bulmer, 2014, *Judicial Tenure, Removal. Immunity and Accountability*. International IDEA, Stockholm.
- I Dewa Gede Palguna, 2018, *Mahkamah Konstitusi, Dasar Pemikiran, Kewenangan dan Perbandingan dengan Negara Lain*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Imam Anshori Saleh, 2014, *Konsep pengawasan kehakiman: upaya memperkuat kewenangan konstitusional Komisi Yudisial dalam pengawasan peradilan*. Setara Press, Malang.

Janedjri M. Gaffar & Rita Triana Budiarti, 2012, *Demokrasi Konstitusional: Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*. Konstitusi Press (Konpress), Jakarta.

Jefri Porkonanta Tarigan, 2023, *Asas Nemo Judex In Causa Sua dalam Pengujian Undang-Undang*. Rajawali Pers, Depok.

Jimly Asshiddiqie, 2006, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, cet. 1, Konstitusi Press, Jakarta.

Maruarar Siahaan, 2015, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.

Marwan Mas, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*. Ghalia Indonesia, Jakarta.

Moh. Mahfud MD, 2007, *Perdebatan Hukum Tata Negara*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.

-----, 2010, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum. Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum*, Mataram-NTB, Mataram.

Mukthie Fadjar, 2004, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bajti, Bandung.

Sebastian Pompe, 2012, *Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung*, Diterjemahkan oleh Noor Cholis, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, Jakarta.



Soerjono Soekanto, 2015, *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*.

PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2016, *Sejarah Peradilan & Perundangan Republik*

Indonesia. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Sugiyono, 2010, *Memahami penelitian kualitatif*. Alfabeta, Bandung.

Thaib, D., & Hamidi, J. Ni'matul Huda, 2013, *Teori dan Hukum Konstitusi*,

Rajawali Pers, Jakarta.

Titik Triwulan Tutik, 2016, *konstruksi hukum tata negara Indonesia pasca*

amandemen UUD 1945. Prenada Media, Jakarta.

Wahbah Al-Zuhaili, 2010, *Fiqh Islām wa Adillatuhu* (Terjemah). Gema

Insani, Jakarta.

Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S. Hiariej, 2021, *Dasar-Dasar Ilmu*

Hukum, Red & White Publishing, Indonesia.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan

Badan-Badan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok

Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok

Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi undang-undang.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) Nomor X/MPR/1998.

Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 02/PMK/2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2017, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Risalah Sidang Perkara Nomor 90/Puu-Xviii/2020 Perkara Nomor 96/Puu-Xviii/2020 Perkara Nomor 100/Puu-Xviii/2020.

C. Jurnal/Artikel

Achmad Arif & Affizal Berryil Dewantara, 2019, “*Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006 (Berdasarkan Asas Nemo Judex Idoneus In Propria Causa dan Prinsip Istiqlal Qadha)*” Volume 13 Nomor 2.

Afriza Linta Pratiwi, 2022, “Politik Hukum Pengaturan Masa Jabatan Hakim Konstitusi dalam UU No 7 Tahun 2020 Perspektif Masalah” (UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri).

Ahmad Fadlil Sumadi, 2011, “*Independensi Mahkamah Konstitusi*”. Jurnal Konstitusi, Volume 8, Nomor 5.

Ahmad Yusup, 2022 “*Analisis Perubahan Ketiga Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Ditinjau Dari Perspektif Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*”, Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 2.

Andi Safriani, 2019, “*Mahkamah Konstitusi di Beberapa Negara Perspektif Perbandingan Hukum*” Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, Volume 6, Nomor 1, 83-90. Aldo Zammit Borda, 2015, “*The appointment, tenure and removal of judges under commonwealth principles: A compendium and analysis of best practice*” *Commonwealth Law Bulletin* 41, no. 3.

Atikah Nurdzakiyyah, Eka Delik Nurwagita & Galuh Putri Maharani, 2022, *“Penghapusan Pasal 22 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sebagai Upaya Memperkuat Independensi Hakim Konstitusi”*, Jurnal Studia Legalia, Volume 3 Nomor 2, 1-20.

Bahder Johan Nasution, 2014, *“Sejarah Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia”*, Inovatif / Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 3.

Doly, Denico & Noverdi Puja Saputra Saputra, 2020, *“Politik Hukum Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi”*, Bidang Hukum Info Kajian, Volume 12, Nomor 17.

European Commission for Democracy through Law, 1997, *“The Composition of Constitutional Courts, Science and technique of democracy”*, Nomor 20 CDL-STD(1997)020.

Frederic Winston et al., 2022, *“Analisis determinan faktor penentu usia harapan hidup di Provinsi Nusa Tenggara Timur”* Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Manajemen, Vol. 18, No. 3.

General Comment 32 on Article 14, 2007, “Right to equality before courts and tribunals and to a fair trial”, UN Doc CCPR/C/GC/32.

Mardian Wibowo, 2016, *“Menakar Konstitusional sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang”* Jurnal Konstitusi Vol. 12, No. 2.

Mark A. Graber, 2007, *Judges and Their Audiences: A Perspective on Judicial Behavior*. By Lawrence Baum. Princeton: Princeton, *Perspectives on Politics*, vol. 5 (Princeton, NJ: Princeton University Press).

M. Beny Kurniawan & Dinora Refiasari, 2024, “*Transformasi Masa Jabatan Hakim Konstitusi Pasca Perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi*” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 21, No. 1.

Melander, G., Alfredsson, G., & Holmström, L. 2004, “*Basic Principles on the Independence of the Judiciary: Adopted by the Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Milan, 26 August-6 September 1985*”, In The Raoul Wallenberg Institute Compilation of Human Rights Instruments (pp. 515-518). Brill Nijhoff.

Muh Ridha Hakim, 2018, “*Tafsir Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi/Interpretation Of Judicial Power Independence In Constitutional Court Decisions*”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 7 Nomor 2, 279-296.

Novianto Murti Hantoro, 2020, “*Periode Masa Jabatan Hakim Konstitusi dan Implikasinya terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman (Term of Office for Constitutional Justices and Its Implications against Judicial Independence)*”, *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, Volume 11 Nomor 2, 191-210.

Owen M. Fiss, 1993, "*The Limits of Judicial Independence*", The University of Miami Inter-American Law Review, Vol. 25, No. 1, pp. 57-76.

Petrus Antonius Lela Udak, Kotan Y. Stefanus , Rafael R. Tupen, 2024 "*Penerapan Asas Nemo Judex In Causa Sua Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dalam Menguji Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*", Petitem Law Journal, Volume 1 Nomor 2

Shirmon Shetreet, 2009, "*The normative cycle of shaping judicial independence in domestic and international law: the mutual impact of national and international jurisprudence and Contemporary Practical and Conceptual Challenges*", Chi. J. Int'l L, Volume 10 Nomor 1.

Titik Triwulan Tutik, 2012, "*Pengawasan Hakim Konstitusi dalam Sistem Pengawasan Hakim Menurut Undang-undang Dasar Negara RI 1945*", Jurnal Dinamika Hukum, Volume 12, Nomor 2, 295-311.

Yanis Maladi, 2010, "*Benturan Asas Nemo Judex Indoneus In Propria Causa dan Asas Ius Curia Novit; Telaah Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 005/PUU-IV/2006*", Jurnal Konstitusi, Volume 7 Nomor 2.

D. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 .

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XVIII/2020.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XVIII/2020.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XVIII/2022.

E. Internet

Hukumonline, 16 Oktober 2018, “Jabatan Hakim MK Satu Periode Dinilai Tepat, Ini Alasannya”, Hukumonline.com, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bc5c4db56c6d/>.

Indonesia Corruption Watch, 25 Januari 2018, “Arief Hidayat Harus Mundur dari Jabatan Hakim Konstitusi” <https://antikorupsi.org/id/article/arief-hidayat-harus-mundur-dari-jabatan-hakim-konstitusi>

Karim Siregar, 21 November 2014, “Ini Alasan Masa Jabatan Hakim Konstitusi Tidak Permanen”, Gressnews.com, <http://www.gresnews.com/berita/hukum/91990-ini-alasan-masa-jabatan-hakim-konstitusi-tidak-permanen--/>.

Susanto, “Periodisasi Hakim MK Cegah Penyelewengan” mediaindonesia.com, 02 Desember 2016, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/80539/periodisasi-hakim-mk-cegah-penyelewengan>.

Website: Incorporated Council of Law Reporting for England and Wales (ICLR). Nemo Judex In Causa Sua. URL: <https://www.iclr.co.uk/knowledge/glossary/nemo-iudex-in-causa-sua/>.

Website: Law Times Jurnal. Nemo Judex In Causa Sua. URL: <https://lawtimesjournal.in/nemo-judex-in-causa-sua/>.

Website: Wikipedia. Nemo Judex In Causa Sua. URL:

https://en.wikipedia.org/wiki/Nemo_iudex_in_causa.

